



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 98 TAHUN 2018

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA TATANDENG KECAMATAN BUKO
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE 2018-2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dengan selesainya penjaringan Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) melalui Musyawarah ditingkat Desa, dipandang perlu meresmikan keanggotaan BPD Tatendeng Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan periode 2018 – 2024;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa, bahwa peresmian anggota BPD di tetapkan dengan Keputusan Bupati;

d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Pemilihan Anggota BPD Desa Tatandeng Kecamatan Buko Nomor : 09/PN- BPD/XII-TTG/2017 Tanggal 19 Desember 2017;

2. Surat pengantar Camat Nomor : 800/08/Kec. Buko Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Berkas BPD terpilih Desa Tatandeng;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TATANDENG KECAMATAN BUKO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2018-2024.
- KESATU : Meresmikan Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Tatandeng Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2018-2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai Hak dan Kewajiban yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menerima tunjangan yang besarnya ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Apabila dalam masa jabatan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA, terdapat adanya Pimpinan dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, akan diadakan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang pelaksanaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Dalam hal terdapat kebijakan mengenai penetapan Keanggotaan BPD akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan, maka masa jabatan keanggotaan BPD akan di sesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 1 Maret 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,




ZAINAL MUS

Tembusan Yth,

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Kepala DPMD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Camat Buko di Tataba.
4. Kepala Desa Tatandeng di Tatandeng.
5. Masing-masing Pengurus BPD di Tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 98 TAHUN 2018

TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TATENDENG
KECAMATAN BUKO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2018-2024

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA TATENDENG KECAMATAN BUKO
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2018-2024

NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1.	HESRON MANSA	KETUA	
2.	EDWIN SINANDE	Wkl. KETUA	
3.	RESLIANA TIIYO	SEKRETARIS	
4.	MARTONENG LOSOIYO	Ketua Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat	
5.	STEVEN MUAT	Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,




ZAINAL MUS

98

NOTA PENGAJUAN KONSEP

Kepada,
Yth. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
di-
Salakan.

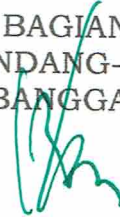
Konsep berasal dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018.

Tentang : Keputusan Bupati tentang Peresmian Keanggotaan
Badan Permusyawaratan Desa Tatendeng Kecamatan
Buko Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2018-
2024.

Telah melalui pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi
yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Salakan, 24-5-2018

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA. KAB. BANGGAI KEPULAUAN,



RABIA, SH.,MH
NIP. 19720209 200312 2 003